

# BAHASA PENDIDIKAN INDONESIA DAN AKAR POLITIK PENDIDIKAN NASIONAL PRA- KEMERDEKAAN

**Muhamad Asngad Rudisunhaji**  
*STAIN Tulungagung, East Java*

**Abstract:** The cultural fight towards the cultural manipulation conducted by the Dutch aggressor shows an education aspect to Indonesian in general. Such cultural fight delivers a political stream as an antithesis action to the aggressor's political policy in education. One important decision which shows this fight is when Malay language was anonymously decided to be the national identity of Indonesian and was confirmed to be the formal language of the nation. In this article, Malay language and Bahasa Indonesia are not confronted, but are used in accordance to its appropriate context.

**Keywords:** Bahasa Indonesia, Akar Politik Pendidikan, Sejarah Pra Kemerdekaan

Penemuan Benua Amerika oleh Columbus, pelaut kelahiran Genoa Spanyol, pada tahun 1492 M merupakan babak baru yang menandai kebangkitan Barat (Lewis, 1995:5). Keberhasilan Columbus menggugah semangat orang-orang Barat untuk berlomba-lomba menemukan tanah baru di belahan dunia lain, termasuk Asia dan Afrika. Ada satu elemen penting yang selalu menjiwai petualangan mereka, yaitu nafsu untuk menaklukkan (Lewis, 1995:5). Dari sinilah lahir imperialisme Barat yang sebenarnya kelanjutan dan perkembangan dari pola relasi Islam-Barat yang berputar pada penaklukan, pengusiran, dan penemuan, karena di tahun yang sama di mana Columbus menemukan benua Amerika, Raja Ferdinand dari Aragon dan Ratu Isabella dari Castile mengusir kekuatan muslim terakhir yang masih ada di Granada Spanyol dalam rangka penguasaan kembali secara penuh wilayah *Iberian Peninsula* (Lewis, 1995:8). Imperialisme Barat yang penuh dengan nafsu penaklukan mempunyai jargon yang sangat terkenal yaitu *gold, glory and gospel* yang dengan teguh dilaksanakan, sehingga salah seorang pelaut Portugis Vasco de Gama ketika berhasil menemukan tanah India beberapa tahun setelah penemuan Columbus, dia dianggap orang yang mampu mewujudkan secara sempurna aspek ganda suatu petualangan, pertama dianggap sebagai gerak strategis perang agama dalam dimensi global dan kedua sukses perdagangan yang ditandai pemotongan dan pemangkasan pelaku-pelaku di wilayah perantara dan bisa secara langsung berhubungan dengan produsen (Lewis, 1995:58).

Indonesia sebagai suatu wilayah kepulauan juga tidak lepas dari kedatangan orang-orang Barat, yaitu Portugis dan Belanda. Dengan kedok perdagangan, Belanda akhirnya mampu berkuasa dan menancapkan kuku penjajahannya di bumi nusantara selama kurang lebih tiga setengah abad lamanya. Suatu rentang waktu yang sangat lama yang memungkinkan untuk melakukan apapun dalam banyak bidang kehidupan;

budaya, politik, ekonomi, pendidikan dan lain-lain. Rekayasa budaya dengan strategi imperialisme benar-benar menghujam dalam jiwa bangsa Indonesia. Salah satu aspek dari strategi budaya tersebut adalah pembatasan dalam akses untuk memperoleh pendidikan yang layak yang ke depan ternyata memiliki implikasi mental historis yang sangat merugikan bangsa Indonesia. Pembodohan sistematis yang dilakukan Belanda, dalam kebijakan pendidikan ternyata kemudian disadari oleh para pejuang bangsa ini yang kemudian melahirkan berbagai perlawanan kultural yang diwujudkan dalam sikap-sikap yang menegaskan nasionalisme dan harga diri bangsa.

Perlawanan kultural terhadap rekayasa budaya yang dilakukan penjajah Belanda mengandung suatu aspek pendidikan terhadap bangsa Indonesia dalam arti luas, di mana dalam perlawanan kultural tersebut terkandung sikap politik sebagai antitesa terhadap kebijakan politik penjajah dalam bidang pendidikan. Salah satu keputusan penting perlawanan tersebut yaitu ketika bahasa Melayu dijadikan identitas bangsa Indonesia dan dijadikan sebagai bahasa nasional, bahasa kebangsaan. Simbol-simbol perlawanan yang lahir dari adanya identitas kebangsaan inilah yang di antaranya memberi landasan terbentuknya Negara bangsa (*nation-state*) Indonesia hingga saat ini.

Pengetahuan terhadap peranan dan pengaruh bahasa kebangsaan ini dalam lintasan kehidupan pendidikan Indonesia menjadi penting baik pada saat ini maupun pada saat masa penjajahan. Dari sini diharapkan ditemukan benang merah historis akar politik pendidikan nasional. Karena begitu luasnya ruang waktu penjajahan yang berlangsung di negeri ini, bukan pada proporsinya jika kemudian makalah ini berpretensi untuk memberikan jawaban yang memuaskan. Tetapi suatu problematika tematik mungkin mampu menstimuli eksplorasi lebih jauh dan komprehensif. Dalam makalah ini hanya dibatasi masa prakemerdekaan sejak dimulainya penjajahan Belanda hingga saat-saat terakhir kekuasaannya di Indonesia. Selanjutnya untuk memperoleh gambaran tersebut diperlukan suatu deskripsi relasional antara kondisi pendidikan dan peranan bahasa Indonesia, bahasa kebangsaan, pada masa kekuasaan penjajah Belanda.

Dalam makalah ini tidak dibedakan antara bahasa Melayu dan bahasa Indonesia, tetapi penggunaan kedua nama tersebut disesuaikan dengan kebutuhan logika sekuensi dari teks.

## **SEJARAH BAHASA INDONESIA**

Sejarah bahasa Indonesia tidak terlepas dari perkembangan bahasa Melayu. Dasar pembentukan bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang seiring dengan tumbuhnya kesadaran kebangsaan pada bangsa Indonesia. Secara historis bahasa Melayu pernah berperan penting dalam pergaulan antar suku bangsa di seluruh nusantara, hal ini diketahui dari prasasti yang ditemukan pada abad VII M di mana bahasa Melayu (kuno) dipakai sebagai bahasa resmi oleh kerajaan Sriwijaya. Di sisi lain, bangsa Melayu memiliki

kegemaran untuk berlayar dan merantau ke daerah-daerah lain. Orang Melayu berhasil menjadikan bahasa Melayu sebagai *lingua franca* atau bahasa penghubung antar suku bangsa. Oleh karena itu, bahasa Melayu mempunyai daerah penyebaran yang luas, dikenal oleh suku-suku bangsa yang lain (Hastuti, 1993:1). Di samping itu, ada juga beberapa alasan lain yang melandasi pemilihan bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia.

Munculnya berbagai pergerakan kebangsaan di era perjuangan kemerdekaan memberikan momentum bagi bahasa Melayu untuk menjadi bahasa persatuan, identitas kebangsaan yang menyatakan semua elemen pergerakan kebangsaan dalam rangka meraih kemerdekaan. Berdirinya Budi Oetomo pada tahun 1908 mengawali berbagai organisasi kebangsaan yang lain. Di kalangan pemuda juga muncul berbagai perkumpulan seperti Jong Jawa, Jong Sumatra, Pemuda Indonesia, Jong Islamitten Bond, Jong Bataksbond, Jong Celebes, dan lain-lain (Ricklefs, 1998:254).

Konsepsi identitas nasional Indonesia yang tidak mempunyai kaitan keagamaan maupun kedaerahan tertentu perlu segera dirumuskan, dan bahasa Melayu menjadi pilihan, dan sesuai dengan perkembangannya, bahasa Melayu tidak lagi disebut bahasa Melayu tetapi disebut bahasa Indonesia. Dengan demikian lahir bahasa Indonesia sebagai sarana persatuan nasional (Ricklefs, 1998:281). Semua organisasi pergerakan kemerdekaan, termasuk perkumpulan pemuda pada waktu itu menyadari betapa pentingnya persatuan nasional, persatuan antar suku bangsa Indonesia dalam satu cita-cita perjuangan kebangsaan. Berangkat dari kesadaran ini, lahirlah Sumpah Pemuda pada Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 di Jakarta. Mulai saat itu bahasa Indonesia "resmi" dan "dinobatkan" sebagai bahasa bangsa Indonesia, bahasa pergerakan dan perjuangan kebangsaan Indonesia.

## **PENDIDIKAN DI INDONESIA ERA PRA-KEMERDEKAAN**

Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia pada era pra-kemerdekaan dilakukan baik oleh rakyat Indonesia maupun penjajah Belanda. Institusi pendidikan tertua yang muncul di Indonesia dari bangsa Indonesia (Jawa) sendiri adalah pesantren. Sedangkan penguasa kolonial Belanda memperkenalkan sekolah sebagai sistem pendidikan lain (modern).

Pesantren yang ada dalam bentuknya seperti di abad XIX ditemukan jejaknya pertama kali pada tahun 1742 M. Pesantren tertua tersebut adalah Pesantren Tegalsari yang letaknya berada di antara daerah Madiun dan Ponorogo (Bruinessen, 1992:72).

Sistem sekolah diperkenalkan oleh penguasa penjajah Belanda pada awal abad XIV. Seperti halnya Portugis, penjajah Belanda mengizinkan para misionaris untuk menyampaikan pengajaran yang mempunyai tujuan utama meningkatkan jumlah pemeluk agama penjajah di wilayah jajahan. Didukung oleh V.O.C (*Verenigde Oost-*

*Indische Compagnie*), seperti dikutip Ahmad Zaini dari M. Hutasoit dalam *Compulsory Education in Indonesia* yang diterbitkan oleh UNESCO, para aktifis misionari mendirikan sekolah-sekolah di Indonesia Timur, khususnya Minahasa dan Maluku (Zaini, 1998:47).

Adapun materi pelajaran yang disampaikan di masing-masing institusi pendidikan, baik Islam ataupun Kristen, secara umum adalah sama. Masing-masing memusatkan perhatian pada ilmu-ilmu agama, yang satu memusatkan pada ajaran-ajaran Islam sedangkan satunya lagi pada dogma Kristen (Steenbrink, 1994:4.17).

Sementara itu di dalam negeri Belanda sendiri terjadi perubahan yang cukup penting. Sejak periode kekuasaan partai Liberal (1870-1900 M) sebagaimana dikutip oleh A. Zaini dari Bernard H.M. Vlekke dalam *The Story of The Dutch East Indies*, pemerintah berada di bawah tekanan kaum nasionalis humanis seperti Fransen de Putte, Kuyper, Multatuli dan Van Deventer untuk merubah kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kondisi masyarakat Indonesia. Di bawah tekanan masyarakat yang menyebut diri *Ethici* inilah, akhirnya Ratu Belanda mengeluarkan kebijakan baru pada tahun 1901 M. Kebijakan ini kemudian terkenal sebagai Politik Etis dan "*aimed at improved Welfare for the people of Indonesia*". (Zaini, 1998:48)

Satu elemen terpenting dari politik etis yang diterapkan sebagaimana usul Van Deventer, adalah menyediakan secara luas suatu sistem pendidikan yang didasarkan atas kepentingan "penduduk pribumi". Dipengaruhi oleh ide liberalisme, sesuai dengan tujuan pendidikan untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan memajukan pemikiran rasional, penguasa penjajah Belanda mulai memodernisasai dan menset up institusi pendidikan baru dari tingkat dasar hingga tingkat tinggi. (Nasution, 1995:16)

Politik pendidikan kolonial erat hubungannya dengan politik mereka secara umum, suatu politik yang didominasi oleh golongan yang berkuasa dan tidak didorong oleh nilai-nilai etis dengan maksud untuk membina kematangan politik dan kemerdekaan tanah jajahannya. Berhubung dengan sikap itu dapat dilihat sejumlah ciri politik dan praktek pendidikan tertentu: gradualisme yang luar biasa dalam penyediaan pendidikan bagi anak-anak Indonesia, dualisme dalam pendidikan dengan menekankan perbedaan tajam antara pendidikan Belanda dan pendidikan pribumi, kontrol sentral yang kuat, keterbatasan tujuan sekolah pribumi dan peranan sekolah untuk menghasilkan pegawai sebagai faktor penting dalam perkembangan pendidikan, prinsip kerkodansi yang menyebabkan sekolah di Indonesia sama dengan di Belanda, tidak adanya peranan pendidikan yang sistematis untuk pendidikan anak pribumi. (Nasution, 1995:20)

Politik pendidikan kolonial yang diskriminatif menjadikan pendidikan pesantren sebagai alternatif lain pendidikan anak-anak muslim. Orientasi pesantren yang kemudian memiliki jaringan internasional dunia Islam semakin memiliki daya tarik tersendiri. Di sisi lain, pesantren juga mulai melakukan reformasi pendidikan secara internal.

Reformasi pendidikan yang nyata dapat dijadikan contoh di antaranya adalah pendirian madrasah Adabiyah di Minangkabau dan pendirian sekolah-sekolah Muhammadiyah di Jawa. Yang pertama didirikan oleh Syaikh Abdullah Ahmad pada tahun 1909 M.(Yunus,1995:63) Sedangkan yang kedua dipelopori oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tahun 1911 M.(Yunus,1995:269) Masing-masing institusi didesain untuk menyediakan pengajaran baik ilmu-ilmu Barat dan ilmu-ilmu agama terhadap murid-muridnya.

Bahasa Indonesia Dalam Pendidikan Indonesia Era Pra-Kemerdekaan, pendidikan mempunyai peran sosial yang strategis dalam suatu sistem sosial. Sistem sosial memiliki berbagai elemen organik yang membentuk satu kesatuan dan saling sangkut paut satu sama lain. Elemen-elemen tersebut bisa berbentuk tingkah laku sosial, nilai-nilai, kepribadian, kebudayaan, proses kelompok, struktur kelompok, pemahaman dan pengawasan tingkah laku sosial dan lain sebagainya. Suatu kelas, sekolah, keluarga, masyarakat desa, perkumpulan dan sebagainya masing-masing dapat disebut suatu sistem sosial yang bersifat interaktif.(Vembriarto,1990:3-4)

Peran sosial strategis pendidikan bisa diarahkan pada tujuan yang benar dan semestinya atau sebaliknya. Penguasa bisa memperlakukan pendidikan sebagai proses pembebasan dan peningkatan martabat manusia atau menjadikannya sebagai alat untuk memperkuat dan mempertahankan kekuasaan dan menancapkan kuku-kuku tajam hegemoni.

Pendirian sekolah-sekolah sebagai salah satu bentuk dari pelaksanaan pendidikan, secara ideal memiliki dua aspek penting, yaitu aspek individual dan sosial. Di satu pihak pendidikan sekolah bertugas dan mempengaruhi serta menciptakan kondisi yang memungkinkan perkembangan kepribadian anak secara optimal. Di pihak lain pendidikan sekolah bertugas mendidik agar anak mengabdikan dirinya kepada masyarakat.(Vembriarto,1990:80) Dari dua aspek tersebut paling tidak dapat dijabarkan empat fungsi pokok sekolah, sebagaimana dikutip Vembriarto dari David Popene, yaitu : transmisi kebudayaan masyarakat, menolong individu memilih dan melakukan peran sosialnya, menjamin integrasi sosial dan sebagai sumber inovasi sosial.(Vembriarto,1990:80)

Pendidikan dalam berbagai bentuknya pada prinsipnya adalah suatu proses sosial yang mengandung pola-pola interaksi. Di mana dalam interaksi ini memerlukan terjadinya kesepemahaman antara satu pihak dengan lainnya. Di sini peran komunikasi menjadi sangat penting. Untuk itu diperlukan model komunikasi yang komunikatif, efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan. Apapun bentuk komunikasi yang dirancang, bahasa memiliki peranan pokok yang tidak mungkin digantikan oleh sarana lain, apalagi untuk keadaan yang bersifat interaktif.

Kebutuhan manusia terhadap bahasa merupakan kebutuhan komunikatif yang sangat penting dalam suatu proses sosialisasi atau

solidaritas kelompok. Kebutuhan tersebut tidak akan pernah dipenuhi jika tidak memiliki norma-norma kebahasaan yang dianut bersama demi mempertahankan dan mengembangkan masyarakat secara keseluruhan. Bahasalah yang menjadikan suatu masyarakat menjadi sentripetal, artinya bahasa cenderung mengabsorbsi masyarakat menjadi satu kesatuan. Kesatuan masyarakat karena mengnut norma-norma linguistik yang sama.(Ohoiwutun,1997:38) Sejak teriakan manusia primitif sampai pada kiriman berita atau risalah ilmiah yang mutakhir, bahasa adalah bersifat sosial.(Hayakawa,1981:8) Dan bahwa semua kerjasama berbagai usaha yang dibutuhkan untuk berfungsinya masyarakat, hanyalah dapat dicapai melalui bahasa, tanpa itu tidak dapat dicapai sama sekali.(Hayakawa,1981:9)

Proses pembelajaran sebagai bagian pendidikan pada hakikatnya merupakan suatu aktifitas komunikasi antara pendidik dan subjek didik. Seorang pendidik paling tidak memiliki dua tujuan utama: memberi penerangan dan membentuk kebiasaan mental yang akan memungkinkan subjek didik mencari dan memperoleh kemampuan untuk membentuk pertimbangan sendiri berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan rasional.(Stebbing,1981:61) Materi apapun yang dipilih untuk disampaikan dan diajarkan akan menghabiskan sebagiannya dalam aktifitas kebahasaan agar tujuan dari proses pembelajaran bisa terwujud. Dari sini terlihat betapa penting peran bahasa dalam proses pembelajaran sebagai bagian pendidikan yaitu media pengantar ilmu dan pengetahuan secara umum. Tanpa bahasa tidak ada perkembangan dan pengembangan peradaban manusia, tanpa bahasa yang komunikatif pendidikan akan gagal sebagai transformasi ilmu dan pengetahuan yang menjadi basis peradaban.

Pendidikan Indonesia , di era pra-kemerdekaan terutama masa penjajahan Belanda, hanyalah alat untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan penjajah. Hal ini merupakan pola umum politik pendidikan kolonialisme. Brugmans, sebagaimana dikutip Nasution, berpendapat bahwa politik pendidikan bukan hanya suatu bagian dari politik kolonialisme akan tetapi merupakan inti politik kolonial. Luas dan jenis pendidikan yang disediakan oleh penjajah Belanda bagi anak-anak Indonesia banyak ditentukan oleh tujuan-tujuan politik Belanda yang terutama dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan ekonomis.(Nasution,1995:3)

Pada tahun 1607 M didirikan sekolah pertama di Ambon untuk anak-anak Indonesia karena saat itu belum ada anak-anak Belanda. Tujuan utamanya adalah untuk melenyapkan agama Katolik dengan menyebarkan agama Protestan, Calvinisme, sedangkan tujuan pendidikan demi pengembangan kecerdasan penduduk masih merupakan pemikiran yang belum lahir.(Nasution,1995:4-5) Kemudian menyusul pada tahun 1630 M, sekolah pertama di Jakarta dibuka dengan tujuan menghasilkan pekerja yang kompeten yang bisa memenuhi kebutuhan V.O.C.(Nasution,1995:5)

Tujuan pendidikan kolonial Belanda ternyata tidak mudah tercapai. Kendala utama adalah masalah bahasa pengantar di sekolah. Pemerintah penjajah Belanda menetapkan bahwa bahasa Belanda sebagai satu-satunya bahasa pendidikan. Ini ditegaskan dalam peraturan sekolah 1643. Untuk itu di sana-sini diadakan usaha untuk mempopulerkan bahasa Belanda. (Nasution, 1995:6) Pada tahun 1780 kembali ditandaskan bahwa hanya bahasa Belanda yang digunakan di sekolah. (Nasution, 1995:7)

Politik bahasa pemerintah kolonial Belanda ternyata gagal. Bahasa Belanda tidak berhasil menjadi satu-satunya bahasa pengantar pendidikan. Tetapi penjajah Belanda tidak kehabisan siasat, pada tahun 1864 M diadakan *Klein Ambtenaarsexamen* atau ujian pegawai rendah sebagai syarat pengangkatan pegawai pemerintah, yang diuji antara lain bahasa Belanda untuk memperoleh ijazah Bahasa Belanda memperoleh tempat yang dominan setelah merupakan jalan satu-satunya ke pendidikan menengah dan tinggi. (Nasution, 1995:7)

Politik pendidikan selain dalam bidang bahasa di antaranya juga dalam kesempatan untuk mengikuti pendidikan. Ada perbedaan yang sangat besar di antara anak-anak Belanda dengan anak-anak Indonesia untuk memperoleh pendidikan. Fasilitas pendidikan yang bermutu tinggi senantiasa dipertahankan selama masa kolonial yang menjaga agar anak-anak Belanda selalu mendapat pendidikan yang lebih baik dari pada anak Indonesia, suatu ciri yang khas dari pemerintah kolonial. Jalan ke perguruan tinggi telah tersedia bagi anak Belanda pada saat hanya segelintir anak Indonesia terdapat pada sekolah rendah yang jumlahnya sedikit dan tidak membuka kesempatan memasuki pendidikan lanjutan. (Nasution, 1995:9)

Pada tahun 1902 M hanya seorang di antara 523 orang Jawa yang bersekolah, akan tetapi bagi orang Belanda satu di antara 5 orang menjadi murid di Hindia Belanda dibandingkan satu di antara 7 orang di negeri Belanda. Pada tahun 1900 M hanya seorang di antara 35-36000 orang Indonesia yang tamat sekolah rendah pemerintah atau kira-kira sama dengan presentase anak Belanda yang lulus H.B.S. di Nederland. (Nasution, 1995:21-22)

Data tersebut merupakan bukti politik kolonial Belanda yang rasialis. Rasialisme bagi penjajah merupakan konsekuensi kenyataan adanya berbagai bangsa yang hidup bersama dalam hubungan kolonial dengan hak yang berbeda-beda. Orang Belanda sebagai penjajah, penguasa, dan pemberi pekerjaan dan orang Indonesia sebagai yang terjajah, buruh dan pekerja. Orang Belanda mempertahankan status kolonial ini sampai akhir masa penjajahan. Dalam dunia kolonial ini orang Belanda dan Indonesia hidup seperti dalam dunia yang terpisah dengan kontak sosial yang minimal dan tiap orang Belanda dipengaruhi oleh kesadaran rasialisnya betapapun ia berusaha menaruh simpati kepada bangsa Indonesia. Superioritas rasial merupakan alas untuk mengamankan orang Belanda terhadap orang Indonesia yang terdidik

yang kian hari kian bertambah jumlahnya yang menjadi ancaman atas kedudukan mereka yang istimewa (Nasution,1995:25).

Bertambahnya orang Indonesia yang terdidik selain karena kecerdasan mereka memanfaatkan belajar di sekolah-sekolah Belanda dengan semaksimal dan seoptimal mungkin juga hasil dari pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat Indonesia sendiri sebagaimana disebutkan di muka. Yang menarik kemudian adalah peranan bahasa Indonesia baik dalam pendidikan yang diselenggarakan oleh penjajah Belanda ataupun oleh bangsa Indonesia sendiri tetap penting dan strategis. Bahasa Indonesia menjadi bahasa pendidikan, politik, dan bahasa perjuangan kemerdekaan. Bahasa Indonesia menjadi simbol kemenangan bangsa Indonesia yang tidak pernah dapat dihapuskan atau dihilangkan dari pergaulan masyarakat Indonesia baik dalam bidang politik, pendidikan, ekonomi, maupun kebudayaan. Bahasa Indonesia merupakan bahasa kemerdekaan, bahasa pembebasan dan bahasa persatuan bagi bangsa Indonesia.

Pemerintah penjajah Belanda walaupun sudah menentukan bahasa Belanda sebagai satu-satunya bahasa sekolah (pendidikan), tetapi tetap tidak mampu menghilangkan pengaruh dan peran penting bahasa Indonesia dalam pendidikan. Bahasa Indonesia tetap diajarkan di Kweekschool dari kelas I sampai kelas III,(Nasution,1995:43) Sekolah Kelas Satu,(Nasution,1995:52) Sekolah Kelas Dua,(Nasution,1995:64) Sekolah Desa,(Nasution,1995:80-81) H.I.S,(Nasution,1995:114) A.M.S.,(Nasution,1995:138) hanya di E.L.S. dan H.B.S. yang tidak diajarkan bahasa Indonesia (Nasution,1995:92-94,131-132).

Di luar pendidikan yang diselenggarakan pemerintah penjajah Belanda, pesantren mulai mengembangkan diri sebagai respon atas kebijakan politik Belanda. Sistem madrasah mulai diperkenalkan pada tahun 1905 M sebagai respon atas jumlah santri yang membludak. Dan mulai tahun 1916 M bahasa Indonesia telah mulai menjadi mata pelajaran di pesantren.(Dhofier,1992:90) Dan pada tahun 1940 berdiri Sekolah Tinggi Islam yang pertama di Indonesia yaitu di Minangkabau dan menjadikan bahasa Indonesia sebagai mata kuliah utama (Yunus,1995:121).

## **PENUTUP**

Tiga setengah abad penjajahan Belanda benar-benar menghancurkan sendi-sendi masyarakat Indonesia sampai tingkat bawah sadar. Sampai tahun 1940 anak Indonesia yang lulus dari sekolah dasar sampai sekolah tingkat atas kurang lebih hanya sepuluh ribu orang.(Dhofier,1992:90)

Bahasa Indonesia menjadi satu-satunya simbol yang mempersatukan dan memberi identitas clan merupakan simbol kemenangan politik bangsa Indonesia. Bahasa yang menyambung dan mempersatukan jiwa-jiwa bangsa Indonesia menuju gerbang kemerdekaan

Walaupun penguasa kolonial Belanda telah memberlakukan suatu kebijakan yang bersifat rasialis dengan usaha sistematis untuk memisahkan bangsa Indonesia dari tradisi dan budayanya, yaitu dengan menjadikan bahasa Belanda sebagai ganti bahasa Indonesia, tapi pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia dalam lintasan historis Indonesia merupakan salah satu manifestasi politik pendidikan Indonesia yang penting.

#### REFERENSI

- Lewis, Bernard. 1995, *Cultures in Conflict Christians, Muslims and Jew in The Age of Discovery*, Oxford University Press, New York
- Nasutin, S. 1995. *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Bumi Aksara, Jakarta
- Ohoiwutun, Paul. 1997, *Sosiolinguistik Memahami Bahasa Dalam Konteks Masyarakat Dan Kebudayaan*. Visipro, Jakarta.
- Panggabean, Maruli, ed., 1981, *Bahasa Pengaruh Dan Peranannya*, YOI, Jakarta
- P.H., Sri Hastuti dkk., 1993, *Pendidikan Bahasa Indonesia*, UPP IKIP Yogyakarta, Yogyakarta
- Ricklefs, M.C. 1998, *A History Of Modern Indonesia*, ter .Dharmono H, Sejarah Indonesia Modern, G.M.U., Yogyakarta.
- Steenbrink, Kareel. 1996, *Pesantren, Madrasah, Sekolah*, LP3ES, Jakarta
- Vembriarto, St. 1990, *Sosiologi Pendidikan*, Andi, Yogyakarta
- Yunus, Mahmud. 1995, *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia*. Mutiara Sumber Widya, Jakarta.
- Zaini, Ahmad. 1998, *Kyai Haji Abdul Wahid Hasyim: His Contribution to Muslim Educational Reform And to Indonesian Nationalism During The Twentieth Century*, Thesis Mc. Gill University
- Ulumul Quran*, Vol.111. No.4 Th. 1992, hlm.90